

## SISWA PAPUA DAN NASIONALISME YANG BAIK-BAIK SAJA?

*Saprillah*

Peneliti Balai Litbang Agama Makassar  
Jln. A.P. Pettarani Nomor 72 Makassar  
Email: pepilitbang@gmail.com

### Abstrak

Generasi muda adalah fondasi penting dalam membangun keberlangsungan spirit kebangsaan. Tulisan yang merupakan refleksi dari penelitian tentang perspektif Siswa Kristen terhadap Kebangsaan dan Keagamaan membahas tentang ‘narasi’ kebangsaan dalam pikiran para generasi muda khususnya yang masih berusia sekolah. Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, Papua. Dengan mengeksplorasi hasil dari kuantifikasi perspektif para siswa, penelitian ini memastikan bahwa narasi kebangsaan siswa Papua tidak berbeda dengan siswa lain di Indonesia. Spirit NKRI tertanam dengan baik di dalam jiwa dan raga mereka yang terbangun melalui serangkaian tindakan paedagogik di sekolah.

**Kata Kunci:** kebangsaan, siswa, perspektif, tindakan paedagogis

### PENDAHULUAN: PAPUA DAN (WACA-NA) NASIONALISME GANDA

*Jika nasionalisme merupakan sebuah proyek bersama untuk kini dan masa depan, maka ia tidak mengenal garis finish. Nasionalisme memang harus diperjuangkan di setiap generasi.*  
-Benedict Anderson, 1999-

Papua adalah ‘negeri’ yang unik. Bukan hanya tampilan fisik ras melanesia yang berbeda dengan ras melayu pada umumnya, wilayah yang eksotik, tetapi juga kesadaran tentang keindonesiaan yang berbeda dengan masyarakat di Indonesia secara umum. Orang Papua dianggap memiliki nasionalisme ganda, Papua dan Indonesia, sekaligus (Matreya, 2012, 2014; Sagrim, 2015).

Nasionalisme ganda bukanlah istilah sub-versif, tetapi istilah historis yang menunjukkan watak perjalanan nasionalisme di Papua yang berbeda dengan perjalanan suku bangsa lain di Indonesia. Nasionalisme Papua dikonstruksi oleh Belanda sejak awal abad 19 dan nasionalisme Indonesia

diperkenalkan oleh orang-orang Indonesia sejak 1945 (Chauvel, 2005; Matreya, 2012). Kesadaran keindonesiaan muncul setelah kesadaran ke-Papua-an telah terbentuk (Matreya, 2012, 2014). Tetapi, istilah ini pun mengundang kritik, setidaknya apabila menggunakan kerangka pikir Ben Anderson. Bagi Anderson (1999), nasionalisme bukanlah warisan dari masa lampau (saja) tetapi *common project* (proyek bersama) untuk kini dan masa depan. Dengan demikian, jika menggunakan pandangan Anderson, nasionalisme bukanlah masa lalu tetapi masa kini dan masa depan. Cerita tentang nasionalisme Papua seharusnya sudah berakhir sejak wilayah ini terintegrasi dengan Indonesia pada 1962.

Istilah nasionalisme ganda di Papua dapat dipahami sebagai istilah historis yang berfungsi sebagai alarm kepada pemerintah (pusat) agar melibatkan Papua dalam ‘proyek bersama’ nasionalisme Indonesia. Sejak ‘menjadi Indonesia’, orang-orang Papua selalu merasa asing dan tidak dilibatkan dalam *common project* nasionalisme. Papua seperti kehilangan diri sebagai bangsa dan menjadi ‘anak tiri’ dari

sistem politik dan pembangunan di Indonesia. Isu nasionalisme ganda berhadapan dengan isu keadilan. Para peneliti Papua menceritakan, nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia bukan rajutan yang saling melengkapi, karena benang keadilan yang sulit ditemukan. Pada saat yang sama, memori tentang sikap Belanda yang istimewa dimunculkan. Pendekatan Belanda dianggap lebih mengerti Papua ketimbang Indonesia. Distribusi politik dalam pemerintahan Belanda lebih baik ketimbang Indonesia. 'Pemerintah Belanda menempatkan beberapa orang Papua dalam posisi strategis pemerintahannya', sedangkan ketika menjadi Indonesia, tidak (Asyhari-Afwan, 2015:4).

Sulitnya nasionalisme Papua dihilangkan, karena nasionalisme Indonesia tidak diperkenalkan secara matang seperti yang dilakukan oleh Belanda, sebelumnya.

Lemahnya nasionalisme Indonesia hingga tahun 1962, disebabkan karena; *pertama*, prosesnya instan, tidak terencana, tanpa proses pendidikan, hanya melalui himbuan dan pembentukan partai politik. *Kedua*, ketika para penggagas Indonesia ditangkap dan dikembalikan ke luar Papua maka pengindonesiaan bagi orang Papua lebih banyak diperankan oleh orang Papua dan orang Indonesia lainnya yang masih dalam tahap mendalami Indonesia. *Ketiga*, penggunaan bahasa Melayu sejak kehadiran gereja dan pemerintah (Belanda) di Papua ternyata bukanlah bibit yang tepat untuk membangkitkan keindonesiaan di Papua. *Keempat*, proses pengindonesiaan orang Papua dilakukan melalui gerakan bawah tanah, karena sejak tahun 1945 hingga 1962, Papua masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda (Matreya, 2014:4).

Dari asumsi di atas, nasionalisme Indonesia hingga 1962 (titik politik di mana Papua terintegrasi menjadi bagian dari Indonesia) sangat lemah, karena faktor

politik Belanda yang dinilai lebih baik menempatkan identitas kepapuaan melalui berbagai mekanisme dan strategi kebudayaan. Sedangkan nasionalisme Indonesia disemaikan dengan cara yang sporadis. Akibatnya, proses integrasi Papua ke Indonesia tidak serta merta menghilangkan nasionalisme Papua yang telah dikonstruksi oleh Belanda. Lahirlah, nasionalisme ganda!

### **SISWA PAPUA DAN NASIONALISME; REFLEKSI HASIL RISET**

Pada 2018, BLAM (Balai Litbang Agama Makassar) bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan melakukan riset yang berjudul *persepsi kebangsaan siswa Kriseten di Kawasan Timur Indonesia*, dengan berlokasi di lima tempat, yaitu Poso, Toraja, Papua, Ambon, dan Manado. Pertimbangan pemilihan lokasi adalah wilayah mayoritas beragama Kristen. Riset ini memiliki sampel 1100 siswa yang dibagi lima wilayah. Masing-masing wilayah mendapatkan 220 angket.

Penelitian ini menggunakan metode *mix sequence analisis*. Dimana metode kualitatif digunakan untuk memperdalam temuan-temuan kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran angket kepada 220 responden siswa kelas XI dan XII di sepuluh (220 adalah jumlah dari 1100). SMA/SMK yang terpilih secara acak. Metode yang digunakan purposive random sampling.

Waktu penelitian dilakukan selama 18 hari kerja, dengan waktu efektif 16 hari (di luar hari pulang pergi). Delapan hari digunakan untuk pengumpulan data kuantitatif plus analisis statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS (Statistic programme for Social Science). Setelah itu, peneliti melakukan pendalaman materi kebangsaan dengan melakukan

wawancara kepada kepala sekolah, guru, tokoh pemuda, dan tokoh agama.

Responden penelitian ini adalah siswa SMA/SMK dari 10 sekolah yang terpilih secara acak. Sekolah yang dimaksud adalah SMAN 1 Papua, SMKN 2 Jayapura, SMKN 3, SMKN 6, SMAN 4, SMA YPPK Taruna Dharma, SMA YPPK Taruna Bhakti, SMA Mandala, SMK Ampari, dan SMA Yapis Pembangunan 5.

Seluruh siswa beragama Kristen. Jumlah siswa yang berjenis kelamin lelaki sebanyak 55.5% (122 siswa) dan jumlah siswa berjenis kelamin perempuan 44.5% (98 siswa). Usia siswa berada pada rentang 15-19 tahun. Usia 16 merupakan usia terbanyak (40,9%). Siswa yang berusia 19 sebanyak 5.9%. Siswa yang berusia 15 sebanyak 9.1%.

Responden berasal dari berbagai jurusan yang berbeda. Jumlah terbanyak IPS sebesar 28.2% (62 siswa), jurusan IPA sebanyak 26.8% (59 siswa), jurusan teknik sebanyak 18.2% (40), jurusan Ekonomi sebanyak 10% (22 siswa), jurusan kelautan sebanyak 10% (22 siswa), jurusan Bahasa sebanyak 3.2% (7 siswa), dan ada 3.6% (8) yang tidak menyebut jurusan.

Mayoritas responden berasal dari suku Papua 54.5% (120 siswa), suku non-Papua, 29.1% (64%), suku campuran Papua-non Papua, 2.3% (5 siswa), dan ada 14,1% (31 siswa) tidak menyebutkan afiliasi sukunya.

Afiliasi gereja siswa mayoritas berasal dari GKI, 50,5% (111 siswa), ada 25.5% (56 orang) siswa yang tidak menyebut gerejanya. Sedangkan sisanya berasal dari GBI, GPI, GPdI, Gidi, GSJA, Kingmi, GBGP, dan Gereja Toraja.

Hasil riset ini menunjukkan, gejala positif tentang nasionalisme di Papua. Riset ini menyimpulkan, perspektif kebangsaan

siswa Kristen di Papua sangat baik. Jumlah persentasi respon positif siswa terhadap isu kebangsaan “Sangat Tinggi”, antara 74,5%-97,7%. Nilai tertinggi berisi harapan tentang Pancasila dan kesejahteraan dan paling rendah disfungsi Pancasila dan perkembangan zaman (74,5%).

Temuan penelitian menunjukkan, kecenderungan jawaban siswa pada aspek normatif sangat tinggi. Namun, pada aspek aktual cenderung menurun. Sebagai contoh; pada tabel b2 (setiap negara wajib membela dan mempertahankan NKRI, mayoritas siswa memberi respon positif, yaitu 97,7% siswa memberi persetujuan. Bahkan, 75,5% yang menyatakan sangat setuju. Namun, ketika diperhadapkan pada sikap disintegrasi, jawaban siswa tidak sekuat aspek sebelumnya. Yang setuju sebanyak 76,9% (40,5% di antaranya sangat setuju). Sedangkan yang memberi respon penolakan sebanyak 20,2% (6,4% di antaranya menyatakan sangat tidak setuju).

Menguatnya ketidaksetujuan responden hingga mencapai 20% terhadap upaya tindakan kekerasan terhadap pegiat disintegrasi bisa dipahami dalam dua konteks; 1) pelajaran kebangsaan di kelas dilakukan dengan pendekatan damai. 2). Pendekatan kekerasan adalah pengalaman traumatik bagi warga Papua. Anak-anak Papua memberi isyarat, bahwa pendekatan kekerasan bukanlah jawaban yang tepat dalam mengatasi masalah disintegrasi. Pendekatan kekerasan justru memicu menguatnya identitas kepapuaan dan sekaligus memicu perlawanan dari masyarakat Papua.

Demikian pula terhadap isu Pancasila. Respon siswa sangat menggembirakan. Kepercayaan mereka terhadap pancasila sangat tinggi. Namun demikian, siswa Papua tampaknya cukup rasional dalam merespon

pertanyaan pada tabel B. 18 (Pancasila bisa diganti jika tidak sesuai dengan perkembangan zaman). Sebanyak 23,2% siswa mengatakan setuju untuk mengganti pancasila jika tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Bandingkan dengan jawaban siswa pada tabel B.14. (Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar negara). 97,7% menyatakan persetujuan. Bahkan, 72,7% di antaranya sangat setuju. Ada 3% kurang setuju dan tidak satupun yang tidak setuju.

Fluktuasi jawaban siswa terhadap Pancasila menunjukkan adanya harapan agar Pancasila terus menerus diaktualisasikan dan dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman. Meski siswa memberi keyakinan penuh terhadap kedudukan pancasila sebagai dasar negara, tetapi fungsinya harus selalu bisa sesuai dengan kehidupan setiap generasi. Jika Pancasila dianggap mengalami disfungsi maka kemungkinan untuk tergantikan dengan ideologi lain sangatlah besar. Artinya, siswa Papua meletakkan pancasila secara ideologis tetapi dengan pendekatan rasional.

Perspektif kebangsaan siswa Papua di atas menunjukkan, siswa-siswa Papua tidaklah berbeda dengan siswa lain di Indonesia. Mereka juga sangat mencintai Indonesia, seperti siswa lainnya di Indonesia.

Lalu, bagaimana membaca isu nasionalisme ganda dengan respon siswa seperti itu? Peneliti mengajukan dua hipotesa; 1) Isu nasionalisme ganda tidaklah terkait dengan kebangsaan. Nasionalisme ganda yang dimaksud sebenarnya adalah sebuah perjumpaan yang saling berkelindan antara keindonesiaan dan kepapuaan, yang kadang-kadang berjumpa secara harmonis dan kadang-kadang berseberangan. Kata kuncinya-tentu saja- adalah keadilan.

Teriakan M (Merdeka) yang kerap diungkapkan oleh orang Papua adalah refleksi dari ketidakadilan. Setiap mereka merasa tidak diberi keadilan, teriakan M pun akan menggema. Tidak hanya di masyarakat, sekolah, kampus, bahkan di ruang lembaga pemerintah pun kerap terdengar dari para pegawai negeri (hasil wawancara dari berbagai pihak). 2) Konfirmasi terhadap analisis nasionalisme ganda Matreya. Bagi Matreya, nasionalisme Papua terbentuk melalui proses habituasi oleh kolonial Belanda, khususnya melalui pembentukan asrama sekolah. Sedangkan proyek nasionalisme yang dibawa oleh Indonesianis dari Ambon, Manado, dan Ternate hanya berada pada level politik. Kata kunci proyek nasionalisme –bagi Matreya- adalah pendidikan. Asumsi ini setidaknya terkonfirmasi melalui jawaban siswa Papua di atas. Proyek kebangsaan melalui lembaga pendidikan telah berhasil membentuk pemahaman siswa di Papua tentang keindonesiaan yang sama dengan siswa lain di negeri ini.

### **Penanaman Kebangsaan kepada Generasi Pelajar; Dari Strategi Formal Hingga Pendekatan Personal**

Kasus yang terjadi di Kota Jayapura pada September 2019 yang melibatkan siswa SMA dan melakukan kekerasan menjadi tantangan riset ini. Bagaimana menjelaskan temuan persepsi nasionalisme yang tinggi, tetapi justru faktanya yang terlibat dalam kerusuhan ini adalah siswa SMA?

Memang, isu kebangsaan di Papua sangatlah menarik. Nasionalisme ganda yang dijelaskan di awal tulisan menunjukkan, ada pekerjaan besar dalam menjelaskan nasionalisme di Papua. Orang Papua sudah lama mengalami trauma relasional. Kejadian di Surabaya yang rasis menyebabkan

resonansinya terasa di Papua. Apatah lagi, kelompok organisasi yang menginginkan kemerdekaan Papua masih ada dan bekerja di bawah tanah. Kasus di Surabaya tampaknya dikapitalisasi untuk melakukan perlawanan kepada negara, dengan tujuan referendum.

Jauh sebelum kasus 2019, kritik kebangsaan melalui teriakan-teriakan M (istilah populer untuk kata Merdeka) sangat jamak terjadi. Bahkan secara metafor, Y (Wawancara Kepala Sekolah, 30 Juli 2018) mengatakan, “anak TK pun bisa teriak M”. Meski teriakan ini tidak bisa serta merta disebut sebagai histeria disintegrasi, namun kenyataannya ada organisasi bawah tanah yang bekerja untuk mengkampanyekan gerakan Papua merdeka dan teriakan ini adalah modal sosial yang penting bagi mereka.

Sebagai contoh, munculnya isu deklarasi Papua Barat di Kampus Universitas Cendrawasih pada 1 Agustus 2018 melalui selebaran undangan terbuka. Kegiatan ini tampaknya batal karena pengamanan yang cepat dari pihak keamanan. Dua hari kemudian, asrama yang berada di Universitas Cenderawasih dirubuhkan. Asrama ini diduga menjadi basis kelompok sipil yang diduga berjejaring dengan gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) (Wawancara Ibu L, Pegawai Kemenag Kota Jayapura, Senin 6 Agustus 2018).

Siswa di Papua tidaklah bersih dari pengaruh disintegrasi. Seorang guru SMA bernama Yo, yang juga merupakan aktivis pemuda Gereja menceritakan pengalamannya. Dia memiliki seorang siswi yang cukup menonjol di kelas dan cukup aktif terlibat dalam kegiatan sekolah. Suatu hari, beberapa orang siswa mengadu kepadanya karena sang siswi mengajak

diskusi tentang kemerdekaan Papua. Si guru segera memanggil siswi tersebut. Dari pengakuannya, siswi tadi hanya ingin berdiskusi dengan teman-temannya. Sang guru melakukan investigasi dengan pura-pura membawa buku rapor sang siswi ke rumahnya. Dan, sang guru menemukan fakta di ruang tamu rumah orang tua siswi tersebut terpampang bendera bintang kejora yang berukuran cukup besar (Wawancara, Sabtu 4 Agustus 2018).

Cerita tentang siswi ini merupakan catatan pinggir yang tak boleh diabaikan. *Jangan dianggap terlalu serius tetapi jangan diabaikan*, kata pak Yo. Artinya, dukungan publik Papua terhadap gerakan dan wacana Papua Merdeka selalu ada meski dengan volume yang kecil. Secara kuantitatif, dukungan terhadap disintegrasi semakin kecil, sebagaimana yang terlihat pada hasil analisa frekwensial di atas. Namun, secara kualitatif suara bernada disintegrasi akan selalu ada di Papua terutama apabila kebijakan pemerintah tidak memuaskan atau tidak tepat untuk kepentingan Papua. Bahkan dalam skala kecil. Misalnya penerimaan beasiswa dianggap terhambat atau tidak adil, orang-orang tua siswa biasanya datang marah dengan menggunakan idiom jarak sosial, bahwa mereka adalah orang yang berhak atas tanah Papua dan orang luar hanyalah tamu (diolah dari berbagai hasil wawancara).<sup>1</sup>

Pada 1962 mulai Maret-Juli, Van der Veur melakukan survey tentang masa depan Papua. Respondennya berjumlah 927 yang

<sup>1</sup> Pengalaman seperti ini peneliti temukan ketika pertama kali ke Papua, medio 2008. Di salah satu warung telekomunikasi terjadi keributan kecil. Seorang *Mace* (sebutan ibu-ibu Papua) menyewa telepon, tapi tidak membayarnya. Pemilik warung (orang Bugis) menegurnya. Si *Mace* justru marah dan mengatakan, bahwa kalian tidak punya hak di tanah Papua, mending kalian kembali ke kampung kalian saja!

yang terdiri dari siswa Lagere Technise Schol (LTS) di Hollandia, Biak dan Merauke, siswa opleiding sekolah guru di Serui dan Merauke, siswa sekolah perawat di Hollandia, siswa sekolah agama di Serui. Hasil riset ini menunjukkan mayoritas responden memilih tetap berada di bawah pemerintah Belanda. Hanya 0,9% responden yang ingin bergabung dengan Indonesia. Riset ini setidaknya menunjukkan bahwa hingga 1962, siswa Papua lebih memilih berada di bawah Belanda.

Artinya, persoalan kepapuaan dan keindonesiaan memang persoalan yang tidak sederhana. Keberhasilan integrasi Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia menyertakan persoalan identitas kepapuaan yang sudah terbentuk secara mapan. Persoalan menjadi semakin rumit ketika kebijakan pemerintah RI cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat Papua. Pendekatan militer yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru tidak menyelesaikan persoalan kebangsaan. Kelompok kecil yang menginginkan Papua Merdeka hidup dan menggelorakan perlawanan terus menerus.

Di tengah situasi seperti ini, sekolah adalah tempat merajut harapan yang paling strategis. Sekolah adalah tempat untuk melakukan 'proyek bersama' nasionalisme seperti yang diusulkan Ben Anderson. Transformasi nalar dan semangat kebangsaan bisa dilakukan di sekolah melalui berbagai strategi oleh para guru. Salah seorang guru perempuan (H) di salah satu SMA swasta Jayapura menceritakan pengalamannya ketika mengajarkan sejarah kemerdekaan Indonesia di kelas. Selalu saja ada pertanyaan dari satu atau dua orang siswa yang mempertanyakan tentang keadilan sejarah bagi masyarakat Papua sejak era integrasi 1962 (Wawancara, 31 Juli

2018). Dialog guru-murid ini menjadi proses penting dari penanaman semangat kebangsaan bagi para siswa. Setidaknya, hasil analisis frekwensial di atas menunjukkan fenomena yang menggembirakan bagi masa depan semangat kebangsaan warga Papua, sebagai bagian dari NKRI.

Strategi formal melalui mekanisme pembelajaran kebangsaan (khususnya PPKN) memang menjadi instrumen yang penting. Sekolah menjadi semacam aparatus ideologis yang berfungsi untuk menanamkan ideologi kebangsaan melalui generasi muda. Namun, diakui oleh Pak A (kepala sekolah) bahwa, Papua membutuhkan pendekatan yang berbeda dari wilayah lain dalam konteks penanaman kebangsaan ini. Pak A menginginkan adanya penambahan jam pelajaran kebangsaan bagi siswa di Papua, mengingat kesadaran kebangsaan di Papua memiliki sejarah yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Meski teriakan M tidak serta merta merefleksikan keinginan disintegrasi tetapi juga menunjukkan bahwa Papua memiliki idiom sosial yang mudah ditarik ke dalam konfigurasi konflik kebangsaan di tanah Papua. Sayangnya, sejauh ini tidak ada political will dari pemerintah untuk memberikan pendekatan pembelajaran formal yang spesifik untuk penguatan kebangsaan bagi siswa di Papua (Wawancara, 7 Agustus 2018).

Upaya yang bisa dilakukan adalah kegiatan ekstra melalui pramuka dan program kemah kebangsaan. Kegiatan kepramukaan menjadi instrumen eksternal yang cukup penting menanamkan semangat kebangsaan karena program-program pramuka salah satunya berorientasi pada penguatan spirit dan semangat kebangsaan. Upaya lain adalah beberapa sekolah menjadi

tempat sosialisasi empat pilar dari DPRD Provinsi Jayapura. Misalnya SMA Mandala Trikora yang beberapa kali menjadi tempat sosialisasi empat pilar (Pancasila, Bhinneka tunggal ika, NKRI, dan UUD 1945) (Wawancara Kepala Sekolah SMA Mandala, 31 Juli 2018).

Pendekatan yang sama juga dilakukan oleh pihak militer di Papua. Misalnya pada 25 September 2017, Korem 172 memberikan pembekalan kebangsaan dan nonton bareng film G30S/PKI yang melibatkan 557 siswa SMKN 2 Kotaraja Jayapura. Menurut Kepala Staf Teritorial Korem 172, Mayor Inf. J.D.P Manalu, materi wawasan kebangsaan yang diberikan bertujuan untuk membentuk generasi muda sebagai manusia berpancasila dan meningkatkan kecintaan kepada bangsa Indonesia (dikutip dari student.cnnindonesia.com, diakses 2 Agustus 2018).

Cara lain yang digunakan oleh sekolah adalah pendekatan kebudayaan. Kebudayaan lokal Papua diberi ruang di sekolah untuk ditampilkan pada even tertentu. Di YPPK Taruna Bhakti, setiap generasi memiliki pasukan koteka dan penari perempuan dengan rumbai khas Papua yang ditampilkan pada peringatan 17 Agustus-an atau festival yang melibatkan para siswa (Wawancara Pak YK, guru PPKN, 30 Juli 2018). Strategi kebudayaan dimaksudkan agar anak-anak Papua tetap dekat dengan kebudayaannya, dan pada saat yang sama, anak-anak Papua merasakan rekognisi kebudayaan mereka sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia.

Pendekatan kebudayaan adalah pendekatan yang paling banyak direkomendasikan oleh masyarakat Papua. Pendeta S, salah seorang tokoh Kristen di Papua, mengatakan, pendekatan kekuasaan dan pendekatan ekonomi tidak bisa menjadi solusi bagi masalah kebangsaan di Papua.

Solusi yang paling tepat adalah kebudayaan. Lokalitas Papua yang begitu khas harus diberi ruang yang sama dengan entitas kebudayaan lainnya. Agar orang-orang Papua merasa setara kedudukannya sebagai warga negara Indonesia (Wawancara, 4 Agustus 2018).

## **PENUTUP**

Perspektif kebangsaan siswa Papua (khususnya yang beragama Kristen) bisa dikategorikan sangat baik. Ini terlihat dari respon secara umum berada di atas angka 90% kecuali pada aspek disfungsi pancasila, dimana pertanyaan ini mendorong responden untuk menggunakan rasionalitas, itu pun dengan jumlah 20% lebih. Artinya, masa depan kebangsaan di Papua sangat cerah. Siswa Papua yang sekarang berusia 16-19 tahun menjadi modal sumber daya yang sangat baik untuk menegaskan eksistensi NKRI dan pancasila sebagai landasan idenya. Para generasi milenial Papua nantinya yang menentukan apakah identitas nasionalisme ganda di tanah Papua masih kontekstual atau tidak. Apakah suara M yang masih jamak diteriakkan akan kehilangan tempat hingga titik nol. Harapan itu bisa terlihat dari hasil kuantifikasi di atas.

Meski hasilnya terlihat positif, namun tetap terlihat adanya jawaban-jawaban negatif dari beberapa gelintir siswa Papua, misalnya keinginan untuk pindah warga negara. Jawaban ini boleh jadi tidak seserius yang dibayangkan, namun tidak bisa diabaikan begitu saja. Bagaimana pun juga, gerakan Papua Merdeka masih ada dan belum sirna. Harapan mereka tentu saja pada generasi muda Papua yang kecewa dengan kebijakan pemerintah, yang memudahkan semangat kepapuaannya dikapitalisasi menjadi semangat perlawanan, bahkan lebih ekstrim lagi semangat diistengrasi.

**DAFTAR BACAAN**

- Anderson, Ben. 1999. *Nasionalisme Indonesia, Kini dan Masa Depan*. Dikutip dari www. Anjinggalak.
- Meteray, Bernanda. 2012. *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: Kompas.
- Meteray, Bernanda. 2014. *Kontestasi Nasionalisme Papua dan Nasionalisme Indonesia Sebelum dan Sesudah Orde Baru*. Makalah dipresentasikan pada seminar akhir tahun dengan tema *Integrasi Sosial Ekonomi, Sosial Budaya dan Sosial Politik Papua Ke Indonesia: Tinjauan Akademik*. Kerjasama Tim Kajian Papua P2 dan Jaringan Damai Papua.
- Afwan, Budi Asyhari. 2015. *Potensi Kearifan Lokal untuk Perdamaian di Tanah Papua*. Yogyakarta: CRCS.
- Chauvel, Richard. 2005. *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*, policy studies. Washington: East-West Centre.